

POLICY PAPER

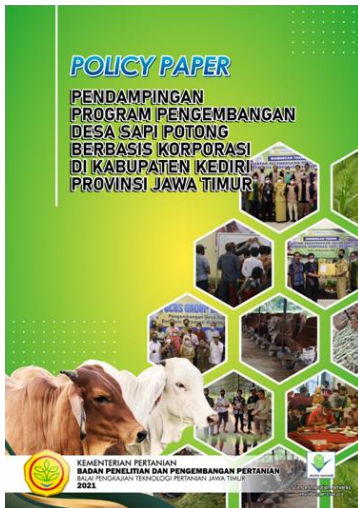
PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SAPI POTONG BERBASIS KORPORASI DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR
2021



Science. Innovation. Networks
www.litbang.pertanian.go.id



POLICY PAPER
**PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA SAPI POTONG BERBASIS KORPORASI
DI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR**

x halaman
23 halaman

Penyusun:

Abu Bakar, S.Pt., MM.
Dr.Gunawan,M.Si

Disain sampul:

Fahrobi Santoko, SM., MM



Penerbit:

**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
2022**

Jl. Raya Karangploso, Km 4 Malang 65101, Kotak Pos 188

Telepon (0341) 494052, 485056

Faksimil (0341) 471255

website : <http://jatim.litbang.pertanian.go.id>

e-mail : bptp-jatim@litang.pertanian.go.id

bptpjatim@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka merealisasikan program peningkatan populasi sapi serta produksi daging sapi untuk mencapai kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak, pemerintah telah mencanangkan program Pengembangan Desa Korporasi Sapi. Pendekatan korporasi dibutuhkan dalam pengembangan peternakan di Indonesia yang sebagian besar pelakunya adalah rumah tangga peternak dengan kepemilikan yang sangat kecil. Kondisi tersebut menyebabkan pola usaha (budidaya) yang dilakukan oleh peternak masih bersifat sambilan.

Pencanangan program pengembangan kawasan korporasi sapi potong diharapkan dapat menjadi titik tolak dimulainya suatu sistem agribisnis peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi tersebut diharapkan akan dapat mendorong pembentukan embrio-embrio agribisnis peternakan sapi potong yang mandiri dan berkeseninambungan yang diharapkan dapat menopang kehidupan perekonomian peternak lokal.

Agar tujuan dan sasaran kegiatan pengembangan kawasan berbasis korporasi sapi potong dapat tercapai secara efektif dan efisien, kegiatan pendampingan mulai dari baseline survey, FGD, Bimtek hingga demplot telah dilaksanakan pada tahun 2021. Pada akhirnya seluruh hasil dari kegiatan telah kami sarikan dalam dokumen *policy paper* yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi para pemangku kebijakan terkait untuk merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan yang dapat ditempuh. Disamping itu, perlu juga dilakukan optimalisasi peningkatan kompetensi dan dedikasi para pelaku korporasi sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Malang, Mei 2022

Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan Desa Sapi Potong Berbasis Korporasi di Kediri ini adalah bagian dari program **Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani** (Permentan No 18/Permentan/RC.040/2018). Secara konseptual, pembangunan agribisnis diarahkan kepada peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sebagai suatu perusahaan atau badan usaha.

Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, wewenang pembangunan berada di daerah otonom kabupaten/kota, dan pemerintah pusat harus mampu mendorong peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan korporasi petani yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana, harus berubah menjadi fasilitator, stimulator dan regulator.

Dalam konteks itulah, Pemerintah Pusat, melalui Kementan, Dirjen PKH, BBI Singosari, telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada lima Poktan (Ngadimulyo, Ngudi Rejeki, Banjarsari, Tani Makmur dan Subur), yang semuanya berada di wilayah Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri. Bantuan untuk masing-masing Poktan berupa 200 ekor sapi (100 ekor untuk *breeding* dan 100 ekor untuk penggemukan), biaya pembuatan kandang, dan sejumlah peralatan/fasilitas pengolahan limbah. Dalam kaitan ini, BPTP Jatim berperan sebagai pendamping teknis.

TUJUAN dari penyusunan *policy paper* ini: (1) Mendeskripsikan kondisi *existing* kawasan desa sapi potong berbasis korporasi di Kabupaten Kediri; (2) Menyusun strategi teknis untuk melanjutkan pengembangan kawasan desa sapi potong berbasis korporasi di Kabupaten Kediri; (3) Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan desa sapi potong berbasis korporasi di Kabupaten Kediri.

Dalam mendampingi program ini, BPTP Jatim menempuh pendekatan komperhensif (legal-formal, akademis, teknis, dan sosial) serta saling sinergi dengan *stake holder* lainnya, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Kediri. Secara kronologi, kegiatannya meliputi: (a) Koordinasi dan pemilihan lokasi pendampingan, (b) *Baseline survey* (identifikasi potensi) dan *focus group discussion* (FGD) untuk menggali pokok permasalahan, (c) Pendampingan pengembangan kelembagaan, dan (d) Pendampingan teknis di sepanjang waktu efektif (September-Desember 2021).

HASIL interaksi dengan *stake holder* dan Poktan melalui kegiatan tersebut, diperoleh gambaran yang patut menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rekomendasi dan implementasinya, seperti berikut:

1. Adanya keragaman pengalaman dan karakteristik antar Poktan. Salah satu yang terpenting adalah, cukup banyaknya anggota yang tidak memiliki sapi

2. Potensi SDM dari sisi usia, dan pendidikan cukup mendukung, tetapi ada kelemahan dalam pengalaman usaha dan tingkat adopsi. Kelemahan ini, didekati dengan bimtek, telah dapat meningkatkan *knowledge* petani menjadi 71,5% untuk formulasi pakan, 77,5 untuk budidaya hijauan, dan 70,5% untuk pengolahan limbah. Untuk menunjang peningkatan *knowledge* tersebut, di masing-masing Poktan telah dibangun demplot budidaya hijauan dan pengolahan limbah.
3. Potensi sumberdaya lahan cukup mendukung, terutama untuk ketersediaan pakan hijauan ternak.

REKOMENDASI yang dapat diajukan berdasarkan hasil *baseline survey*, dan interaksi sepanjang pendampingan dan hasil FGD adalah sebagai berikut:

1. **Kelembagaan.** Telah disepakati oleh kelima Poktan, bahwa model korporasi yang akan dibangun adalah koperasi. Dalam jangka pendek, koperasi yang paling realistis adalah dalam bentuk koperasi sekunder. Semua Poktan membentuk Koperasi Primer, kemudian secara kelembagaan bergabung dan membentuk Koperasi Sekunder. Pilihan ini untuk mengakomodasi keragaman pengalaman antara Poktan, posisi yang saling berpecah, dan status aset yang menjadi milik kelompok, sehingga sulit dilebur menjadi milik satu korporasi tunggal. Dalam jangka panjang, Koperasi Sekunder dapat ditransformasikan menjadi *holding* sapi potong. Dengan demikian, yang awalnya Poktan/Koperasi Primer independen, dengan *holding*, patuh kepada AD/ART *holding* yang disepakati.
2. **Manajemen Pakan.** Keleluasaan lahan untuk produksi pakan hijauan ternak, baik milik anggota maupun di luar anggota, memberi keleluasaan pula kepada masing-masing Poktan untuk memilih formula pakan yang diminatinya. Dua strategi yang direkomendasikan adalah: (a) Pakan berbasis rumput unggul dan konsentrat, dengan kebutuhan lahan pakan hijauan 8-10 ha, serta, (b) Pakan penggemukan berbasis pakan lengkap, dengan kebutuhan lahan pakan hijauan 4-5 ha. Kebutuhan pakan hijauan tersebut dapat dicapai dengan mengatur jadwal tanam agar panen sesuai dengan kebutuhan
3. **Pengembangan SDM.** Rekomendasi pengembangan SDM ini disesuaikan dengan cakupan efektif rekomendasi, sehingga hanya sampai tahap ketiga yang direncanakan, yaitu Tahap I: **Konsolidasi**, Tahap II: **Pengembangan usaha dan jejaring**, serta Tahap III: **Inisiasi *holding* sapi potong**. Kedua, yang dimaksud "SDM" dalam hal ini juga termasuk pendamping, yang pada saatnya harus mampu bertransformasi "hanya" menjadi regulator. Walau aspek yang perlu dikembangkan cukup banyak, namun sampai dengan Tahap I ini, yang terpenting dalam pengembangan SDM adalah aspek manajerial, *skill* ekonomi, dan sosio-kultural. Strateginya sendiri bisa bervariasi antara *on-job training* dan *off-job training*. Dalam hal ini, interaksi pendamping dengan Poktan dipandang sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
PENDAHULUAN	1
TUJUAN PENYUSUNAN <i>POLICY PAPER</i>	3
PENDEKATAN	5
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	7
<i>BASELINE SURVEY</i>	7
Tindak Lanjut <i>Baseline Survey</i> : Bimbingan Teknis dan Demplot	8
<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	9
IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	11
Kelembagaan.....	11
Manajemen Pakan.....	16
Pengembangan SDM	18
PENUTUP	20
UCAPAN TERIMA KASIH	22
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan CPCL Program Pengembangan Korporasi Desa Sapi Potong di Kabupaten Kediri .	7
Tabel 2. Prakondisi manajemen usaha sapi Poktan saat ini dan ideal yang diharapkan ke depan	9
Tabel 3. Kelebihan dan kekurangan tiga pilihan model korporasi sapi di Kab. Kediri	14
Tabel 4. Rekomendasi pengembangan SDM sesuai dengan tahapan kemajuan korporasi yang direncanakan.....	19
Tabel 5. Alternatif Topik/Materi Pendampingan Yang Dibutuhkan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendekatan pendampingan PKBP-Sapo oleh BPTP Jatim dan hubungannya dengan <i>stake holder</i> lainnya	5
Gambar 2. Tiga pilihan model koperasi pada korporasi sapi di Kediri	13
Gambar 3. <i>Roadmap</i> korporasi sapi potong Kediri	16
Gambar 4. Alternatif strategi manajemen pakan 200 ekor sapi potong	17
Gambar 5. Alur Pengembangan Kapasitas SDM Korporasi	29
Gambar 7. Kerangka Kompetensi Dasar Yang Diperlukan Dalam Pengembangan SDM Korporasi.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kendala dan dampak pada masing-masing kelompok pelaku rantai pasok berdasarkan hasil FGD.....	24
Lampiran 2. Hasil kesepakatan pembentukan korporasi Desa sapi di Kab.Kediri.....	26
Lampiran 3. Pengembangan SDM mendukung pengembangan sapi potong berbasis korporasi	28

PENDAHULUAN

Salah satu pendekatan pembangunan pertanian adalah berbasis kawasan, korporasi dan sumberdaya lokal. Secara legal formal hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang "**Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**" serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2018 tentang "**Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani**". Pengembangan kawasan berbasis korporasi yang diterapkan di Kediri ini merupakan langkah awal yang ditempuh menuju industrialisasi peternakan sapi potong. Korporasi sendiri berarti suatu perusahaan atau badan usaha yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Pelaku utama dalam program Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sapi Potong (**PKBK-Sapo**) adalah kelompok tani, peternak, pedagang, dan pengusaha kecil menengah. Dengan konsep korporasi diharapkan mampu memicu terjadinya kombinasi kegiatan strategis berskala ekonomi, baik pada tataran *on farm* maupun *off farm* dalam skala usaha industri yang terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis. Kondisi tersebut akan mampu mendorong percepatan tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal, khususnya untuk sapi potong.

Pada skala yang lebih luas, PKBK-Sapo yang berwawasan ekonomi tersebut, menjadi koridor utama untuk lebih mudah membangun hubungan kerjasama dengan perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, peternak, industri rumah tangga dan institusi pendukung lain dalam proses produksi, pengolahan, perdagangan dan pada konteks integrasi dengan pasar yang lebih luas. Maka dari itu perlu dilakukan usaha peningkatan kapasitas peternak mulai dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing (Ilham dan Haryanto, 2020).

PKBK-Sapo dalam suatu wilayah kabupaten/kota harus sejalan dengan pembangunan agribisnis, yaitu diarahkan kepada peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sebagai suatu perusahaan atau badan usaha. Paradigma ini berbeda dengan pendekatan pembangunan peternakan selama ini, karena didalamnya termasuk pembangunan wilayah dan manusia secara holistik dan terintegrasi. Pelaksana PKBK-Sapo seperti telah disebutkan sebelumnya, beserta *stake holders* terkait lainnya bekerja dalam satu wadah Unit Manajemen, yang secara langsung akan berhadapan dengan pasar dan konsumen.

Strategi pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produk pertanian yang berdaya saing dan menjadikan suatu unit usaha dapat dilakukan melalui peningkatan skala

usaha, penerapan manajemen usaha dan penerapan teknologi produksi secara terpadu dan simultan dalam sistem agribisnis. Subsistem agribisnis hulu dan budidaya (*on farm*) yang umumnya berada di wilayah pedesaan hanya mungkin berkembang pesat bila ditarik oleh subsistem agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran) yang umumnya berada di wilayah perkotaan. Demikian juga sebaliknya, subsistem agribisnis hilir akan mampu berkembang dan berdaya saing bila didukung oleh subsistem budidaya dan agribisnis hulu yang kuat.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kawasan, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku pengembangan kawasan peternakan, yaitu masyarakat peternak, baik ditingkat pusat (Kementerian Pertanian) melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH), didukung dengan penerapan inovasi teknologi oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian, maupun daerah dibawah koordinasi pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, wewenang pembangunan berada di daerah otonom kabupaten/kota, sedangkan pemerintah pusat harus mampu mendorong peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan korporasi peternakan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempersiapkan pengembangan kawasan korporasi yang berbasis agribisnis. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi sebagai fasilitator, stimulator dan regulator pengembangan kawasan korporasi sapi potong.

TUJUAN PENYUSUNAN *POLICY PAPER*

Policy paper ini disusun pasca berakhirnya pendampingan PKPB-Sapo tahun anggaran 2021 oleh BPTP Jatim yang berlangsung relatif singkat (September-Desember 2021). Oleh karena itu *policy paper* ini menjadi penting untuk mengantisipasi dinamika kebijakan pusat (Dirjen PPKH, Kemtan) bilamana mengharuskan Pemda Kediri mengambil alih pengembangan program ini lebih lanjut.

Policy paper menyajikan potret seutuh-mungkin kegiatan pendampingan sampai akhir tahun 2021, yang secara lebih spesifik memuat:

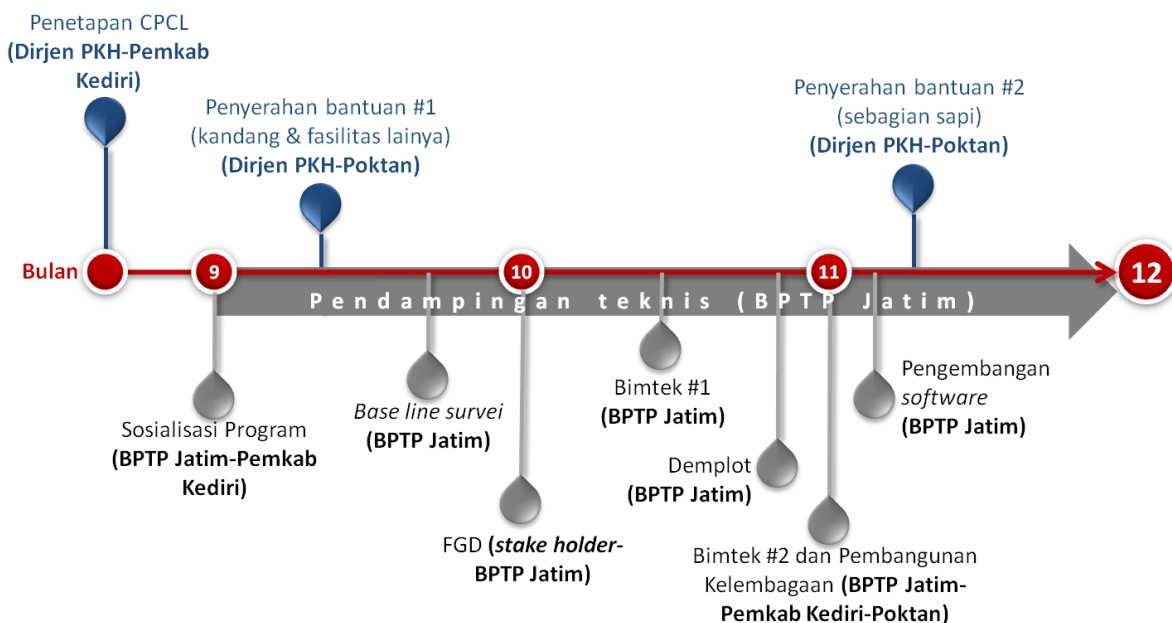
1. Kondisi *existing* PKPB-Sapo beserta analisisnya di Kabupaten Kediri pasca dilakukan pendampingan
2. Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan desa sapi potong berbasis korporasi, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dengan demikian, diharapkan dapat menyediakan bahan penyusunan strategi teknis untuk melanjutkan PKPB-Sapo oleh Pemkab Kediri.

PENDEKATAN

Kegiatan dimulai bulan September sampai dengan Desember 2021 yang berlokasi di Desa Ngadiluwih, Badal, Banjarejo dan Tales yang melibatkan lima Poktan di wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan Program Pengembangan Desa sapi potong Bebas Basis Korporasi, meliputi, Koordinasi dan Pemilihan Lokasi kegiatan pendampingan korporasi, Baseline Survey (Identifikasi potensi) dan *focus group discussion* (FGD) untuk menggali pokok permasalahan, Pendampingan Pengembangan kelembagaan Korporasi, serta Pendampingan Teknis (Gambar 1).



Gambar 1. Pendekatan pendampingan PKBP-Sapo oleh BPTP Jatim dan hubungannya dengan *stake holder* lainnya

Secara substansial, program ini dijalankan dengan mengkombinasikan empat pendekatan, yaitu:

1. **Legal-formal.** Artinya, kepada Poktan diberi pemahaman mengenai perundangan yang berlaku, terutama kaitanya dengan status dan pemanfaatan aset yang dibantukan. Secara intensif hal ini disampaikan pada saat sosialisasi program
2. **Akademis.** Wujud konkrit dari pendekatan ini dalam bentuk *base line survey* dan Focus Group Discussion (FGD), yang bertujuan mengetahui potensi dan kendala serta

memahami dan membangun kesepahaman untuk beberapa detail rencana program dan implementasinya

3. **Teknis.** Artinya, pengenalan invensi-invensi teknologi produksi sapi potong dan pakan. Secara intensif, pendekatan ini dilakukan pada saat kegiatan Bimtek
4. **Sosial.** Adalah dialog informal di sepanjang kunjungan lapang, mencakup segala hal yang dipandang penting, baik oleh petugas maupun oleh peternak. Lebih seringnya, menyangkut kendala-kendala teknis dan non teknis yang dihadapi di lapang.

Kombinasi keempat pendekatan di atas penting, mengingat gagasan sentral kegiatan ini adalah membangun "kelembagaan bisnis modern". Dengan kata lain, program ini mengenalkan perubahan di tengah masyarakat dengan budaya musyawarah-mufakat, bukan sekadar untung-rugi. Karena itu, wujud fisik maupun implementasi non fisik yang dicapai adalah hasil interaksi antara Poktan dengan BPTP Jatim dan *stake holder* lainnya. Pendekatan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan peluang keberlanjutan program.

Untuk membantu kinerja di sektor produksi, BPTP Jatim mengembangkan *software* atau aplikasi untuk membantu dan memudahkan Poktan dalam recording ternak. Aplikasi ini juga memandu peternak dalam membuat formulasi ransum yang baik.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan oleh Dirjen PPKH dan Dinas Peternakan Kediri, maka ditetapkan CPCL sebagai berikut (Tabel1).

Tabel1. Ringkasan CPCL Program Pengembangan Korporasi Desa Sapi Potong di Kabupaten Kediri

No	Nama Kelompok Tani	Alamat	Nama Ketua	Jumlah anggota (orang)	Pemilikan sapi pribadi		Lahan pribadi HMT (Ha)
					Jumlah (ekor)	Tidak punya sapi (orang)	
1.	Ngadimulyo	Rt.01 Rw.05 Dusun Ngadiloyo Desa Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih	Mat Sujud	19	69	0	10,72
2	Ngudi Rejeki	RT.01 RW.04 Dusun Ngadiluwih Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih	Joni Sriwarsono	16	71	0	9,5
3	Banjarsari	RT. 03 RW. 02 Dusun Kendaldoyong Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih	Bahrul Basith	22	12	17	15,5
4.	Tani Makmur	RT.03 RW.01 Dusun Nambangan Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih	Sofarudin	24	50	13	12,9
5.	Subur	RT.01 RW 05 Dusun Krajan Desa Tales Kec. Ngadiluwih	Siswoko	51	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data

Berdasarkan Tabel1 di atas, ada keragaman antar Poktan, yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong suksesnya program ini. Pemahaman lebih rinci diperoleh melalui kegiatan *baseline survey* dan FGD berikut.

BASELINE SURVEY

Kegiatan *baseline survey* ditujukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan dalam pengembangan kelembagaan dan teknis budidaya sapi potong serta aspek sosial ekonomi rumah tangga, maupun pola usahanya. Data ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pendampingan program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan kegiatan *baseline survey* yang telah dilakukan, beberapa karakteristik penting dari responden menunjukkan potensi yang cukup baik, sebagai berikut:

1. Usia peternak didominasi oleh yang masih dalam rentang usia produktif (31-60 tahun) sebanyak 83%, dan sebagiannya tergolong milenial (17-40 tahun) lebih dari 26,5%

2. Dari sisi pendidikan didominasi oleh lulusan SMP-SMA 63%, ditambah dengan lulusan D3, S1 dan S2 sebanyak 23%, sehingga total 86%
3. Pengalaman usaha sapi rata-rata 8 tahun. Angka ini cukup rendah disebabkan sebagian peternak tidak memiliki sapi, sehingga pengalamannya dianggap 0 (nol). Kelemahan ini tidak menyebar merata pada kelima Poktan (Tabel1)
4. Pengetahuan dan tingkat adopsi peternak terhadap sejumlah teknologi tanam pakan hijauan, formulasi dan pemberian pakan dominan menyatakan tidak tahu (76%). Sisanya, cukup berimbang antara yang sudah tahu tapi belum mempraktikkan (13%) dan sudah mempraktikkan (11%)
5. Pola tanam yang diterapkan perternak umumnya cukup mendukung ketersediaan pakan hijauan ternak. Di musim hujan maupun kemarau mereka menanam jagung, tebu dan rumput gajah. Sebagian tanaman jagung bahkan sengaja dipanen muda untuk pakan ternak sendiri atau dijual. Ini belum termasuk lahan peternak yang secara khusus ditanami rumput untuk pakan hijauan ternak.

Berdasarkan hasil *baseline survey* di atas, ditinjau dari segi usia dan pendidikan, cukup mendukung suksesnya usaha korporasi sapi potong. Namun demikian, dari segi pengetahuan atau pengalaman dan tingkat adopsi masih perlu ditingkatkan. Masalah ini didekati dengan penyelenggaraan bimbingan teknis, pembangunan demplot pakan hijauan ternak, dan pendampingan intensif di lapangan.

Tindak Lanjut *Baseline Survey*: Bimbingan Teknis dan Demplot

Bimbingan teknis dilakukan sebanyak dua kali. Bimbingan teknis yang pertama mengangkat topik manajemen pakan. Bimbingan teknis yang kedua mengangkat topik pengolahan limbah ternak dan penguatan kelembagaan kelompok tani berbasis korporasi.

Hasil analisis *pre-test* dan *post-test* peserta bimbingan teknis berhasil meningkatkan pengetahuan:

- Formulasi pakan sapi sebesar 71,5%
- Budidaya hijauan pakan ternak serta pengawetan pakan sebesar 77,5%
- Pengolahan limbah ternak sebesar 70,5%.

Untuk meningkatkan tingkat adopsinya, dibangun demplot pengenalan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pembuatan Silase dengan kapasitas 10 ton. Luas lahan yang ditanami HPT adalah 5 ha, terdiri dari 2,5 ha rumput Pakchong dan 2,5 Ha tanaman Sorgum untuk pengenalan HPT baru. Selain demplot HPT, juga dibangun demplot pembuatan silase berkapasitas 2 ton pada setiap kelompok.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, belum dapat dikaji sejauh mana kinerja demplot dan respons Poktan terhadap introduksi teknologi yang dikenalkan tersebut.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk mengurai kendala dan dampak dari rangkaian rantai pasok usaha sapi potong, berdasarkan pengalaman sebelumnya dan peluang pemecahannya ke depan dalam konteks usaha sapi potong berbasis korporasi. Hasil FGD disarikan pada Tabel 2, menggambarkan prakondisi sistem manajemen Poktan, dimana korporasi ini akan dibangun, dan kinerja yang diharapkan ke depan. Hasil FGD selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1.

Tabel 2. Prakondisi manajemen usaha sapi Poktan saat ini dan ideal yang diharapkan ke depan

No	Aspek	Saat ini	Yang diharapkan ke depan ^{*)}
1.	Status aset (lahan, kandang, sapi, alat)	<ul style="list-style-type: none"> • Milik individu peternak • Sebagian alat milik Poktan 	Milik korporasi, khususnya yang diperoleh melalui skim bantuan pemerintah (kandang, sapi, sebagian alat)
2.	SDM pengelola	Mengelola sapinya sendiri, atau memelihara sapi orang dengan bagi hasil	200 ekor sapi bantuan dikelola bersama dengan konsekuensi pembiayaan sesuai kesepakatan
3.	Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Modal sendiri, semampunya • Pihak ketiga yang dimediasi Poktan 	Dikelola korporasi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan modal/iuran anggota • Penyertaan modal pihak ketiga
4.	Sistem kerja	Tradisional/semampunya	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
5.	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dijual sendiri • Dimediasi/info dari Poktan 	Dikelola oleh korporasi dengan detil yang disepakati
6.	Pengembangan usaha	Sendiri	Dikelola oleh korporasi dengan detil yang disepakati
7.	Jejaring	Terbatas dan tidak mengikat	Dapat berkembang luas dan kontraktual

^{*)} Untuk mengelola usaha sapi potong 200 ekor secara berkelanjutan dan berkembang

Implikasi dari hasil FGD di atas dan keseluruhan penjelasan hasil sebelumnya, disarikan dalam bab **Implikasi dan Rekomendasi** berikut.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Kelembagaan

Mengacu pada (Permentan No 18/permentan/RC.040/4/2018) tentang "Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani", pasal 1 ayat 2, Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Dua isu utama yang menjadi pijakan penyusunan rekomendasi ini adalah:

1. **Pasal 6, ayat 2, butir c**, bahwa sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah "margin profit petani". Isu yang berkembang selama ini, posisi tawar petani sebagai pelaku sektor hulu, lebih rendah daripada sektor hilir (perdagangan,), sehingga menekan margin profit petani. Untuk meningkatkan posisi tawar tersebut, pendekatan yang dipilih adalah dengan penguatan kelembagaan petani
2. **Pasal 19, ayat 2**, bahwa Petani mengikutsertakan paling sedikit: (a) Kelembagaan Petani, dan (b) Pelaku usaha. Sesuai dengan amanah Permentan di atas, dalam konteks peningkatan "margin profit petani", bukan dengan mematikan Pelaku usaha lainnya, melainkan menyertakan mereka ke dalam sistem usaha bersama atau kerjasama yang memungkinkan.

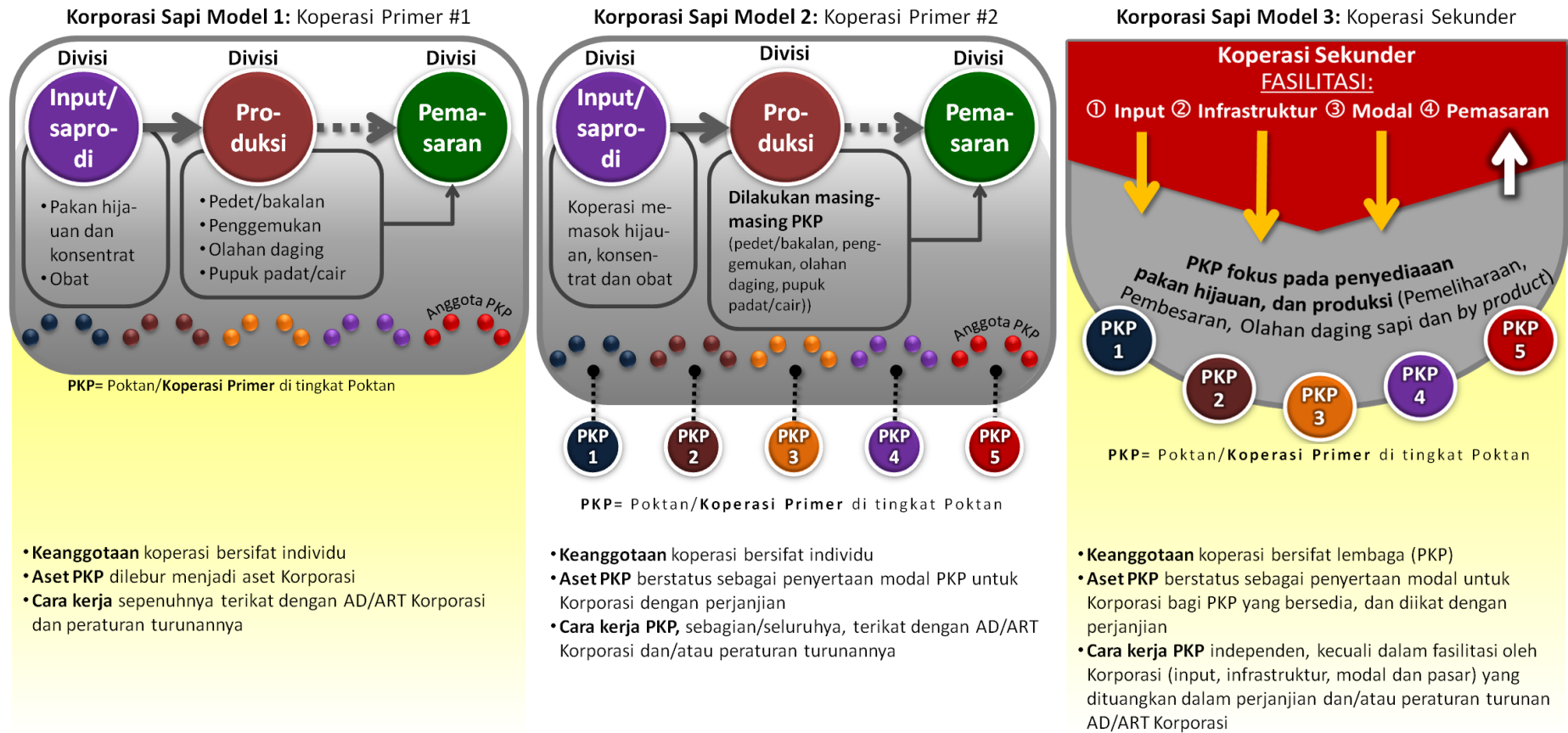
Kedua pijakan utama tersebut dipilih hanya sebagai langkah awal atau fokus jangka pendek, dengan pertimbangan kondisi riil saat sekarang:

1. Petani harus segera menyesuaikan diri dalam memelihara 200 ekor sapi secara berkelompok, dari sebelumnya yang hanya memelihara beberapa ekor sapi secara individu
2. Pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan harian sapi harus segera dilakukan oleh kelompok, agar sekurangnya mampu mempertahankan kondisi sapi yang ada saat ini, sambil menunggu penyusunan kelembagaan yang disepakati dan stabil.

Karena itu, dalam rekomendasi ini, lebih dikerucutkan lagi kepada penguatan kelembagaan secara internal korporasi. Telah disepakati oleh kelima Poktan penerima manfaat program, kelembagaan korporasi yang akan dibangun berbentuk koperasi (Lampiran 2), namun belum ada spesifikasi koperasi dimaksud¹. Dengan mempertimbangkan prakondisi pengalaman

¹Setelah dibentuk "Dewan Pendiri Koperasi", pembentukan "Pra Koperasi" disepakati akan dibentuk setelah semua sapi bantuan sejumlah 200 ekor per Poktan telah diserahkan

Poktan yang beragam dan lokasi poktan yang terpencar, serta status kepemilikan aset oleh Poktan, maka ada tiga pilihan model (Gambar 2).



Gambar 2. Tiga pilihan model koperasi pada korporasi sapi di Kediri

Ketiga pilihan itu diajukan, selain karena prakondisi yang beragam dan letak antar Poktan yang berpecah, juga karena status aset penting (kandang, beberapa peralatan/fasilitas, dan terutama sapi) secara legal formal adalah milik Poktan. Upaya penyatuan aset dari kelima PKP, yang berarti menafikan eksistensi Poktan, akan berisiko kepada resistensi, walaupun secara legal-formal memungkinkan. Secara keseluruhan hal tersebut akan mengganggu kinerja korporasi. Untuk melihat peluang dampak dimaksud, kendala dan jalan keluarnya, **Gambar 2** disajikan kembali secara tabular berikut (Tabel 3).

Tabel 3. Kelebihan dan kekurangan tiga pilihan model korporasi sapi di Kab. Kediri

Komponen	Koperasi Primer #1	Koperasi Primer #2	Koperasi Sekunder
Status PKP	Dianggap tidak ada atau dilebur menjadi satu korporasi	Sebagai mitra	Sebagai mitra
Aset PKP	<ul style="list-style-type: none"> Dilebur menjadi milik korporasi Kendala: Aset secara legal formal milik Poktan 	<p>Jalan keluar: Sebagai penyertaan modal untuk korporasi</p>	Sebagai penyertaan modal untuk korporasi
Keanggotaan	Bersifat individu	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat individu Kendala: Anggota tidak fokus karena adanya dualisme kepentingan 	<p>Jalan keluar: Keanggotaan bersifat lembaga (PKP); anggota fokus di PKP-nya masing-masing</p>

PKP: Poktan/koperasi primer di masing-masing Poktan

Berdasarkan bahan-bahan pertimbangan di atas, maka pilihan yang paling realistis, paling tidak dalam jangka pendek, adalah Model 3 (Koperasi Sekunder), sebab pilihan ini mempunyai fleksibilitas:

1. Masing-masing Poktan/Koperasi Primer (PKP) mempunyai otonomi untuk mengelola sumberdayanya sendiri tanpa terganggu dan/atau tergantung oleh keragaman dan lokasi antar PKP yang berpecah. Dengan demikian, sembari merealisasikan pembentukan koperasi Sekunder (juga primer di masing-masing PKP), kegiatan harian penanganan sapi yang ada sekarang dapat tetap dilakukan tanpa estimasi yang tidak menguntungkan PKP
2. Dalam waktu yang sama dan dalam skala tertentu, antar PKP saling terikat oleh kebijakan rencana kerja Korporasi yang disepakati.

Secara prinsip, model Koperasi Sekunder ini akan berperan mirip dengan *holding company*, yaitu:

1. Menyusun perencanaan dan mengendalikan produksi berdasarkan atas kesepakatan, dan dituangkan dalam AD/ART koperasi, tanpa mengurangi otonomi masing-masing PKP untuk berimprovisasi dan mengembangkan kreativitasnya. Dalam perjalanannya ada risiko tidak semua PKP mengalami kemajuan seperti yang direncanakan. Maka Korporasi

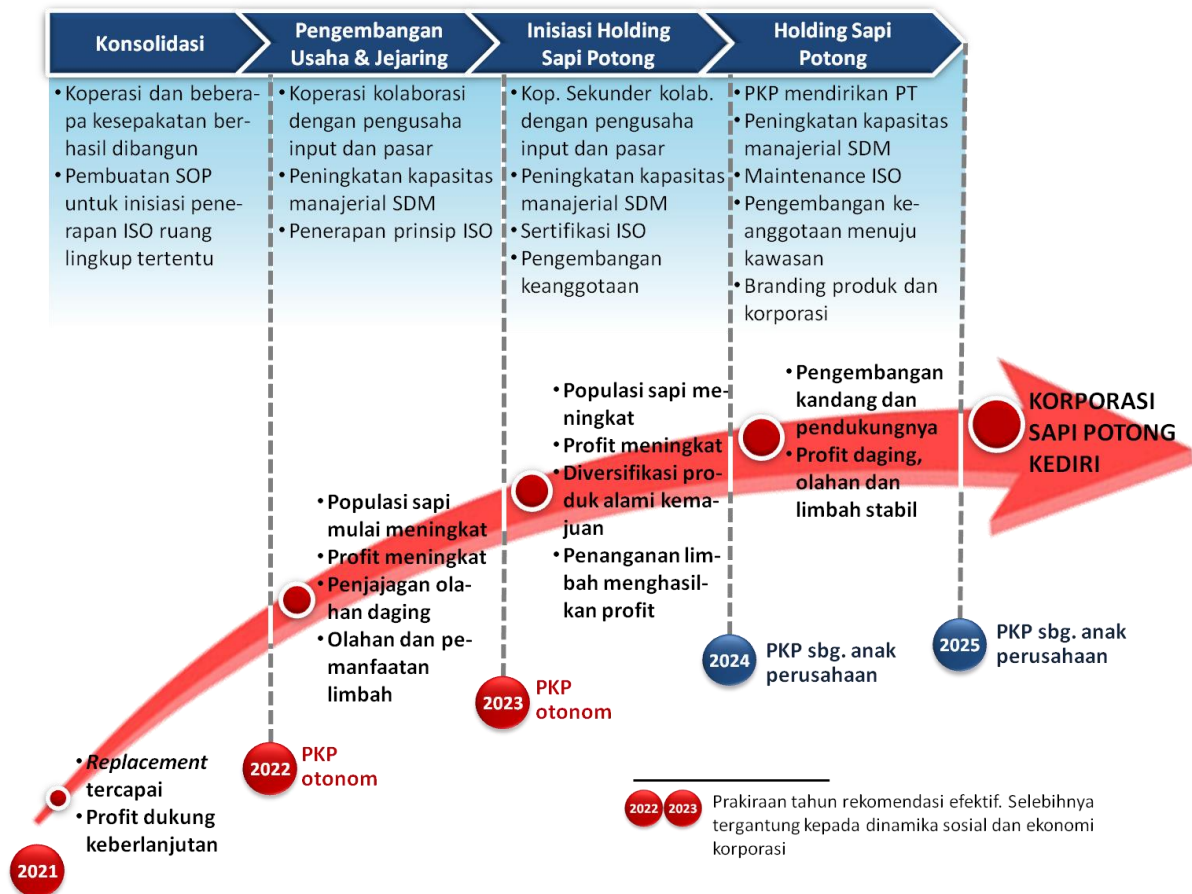
dapat berperan menjadi mediator dan fasilitator untuk meningkatkan kinerja PKP tersebut

2. Penyediaan/fasilitasi kebutuhan usaha PKP. Dengan peran ini PKP dapat memperoleh kemudahan atas kebutuhannya dengan harga yang lebih murah, baik karena belanja dalam partai besar, maupun karena jejaring dengan supplier yang dibangun kemudian. Disarankan, Korporasi menyediakan kebutuhan usaha:
 - 2.1. **Input**, terutama kebutuhan yang berupa barang pabrikan
 - 2.2. **Infrastruktur**, semua kebutuhan yang terkait dengan pengembangan kandang dan fasilitasnya
 - 2.3. **Modal**, terutama untuk kebutuhan yang tak mampu dicukupi sendiri oleh Koperasi Primer, atau adanya kesepakatan pengembangan dan/atau perluasan usaha bersama
 - 2.4. **Pemasaran**; ke depan, yang dimaksud pemasaran tidak hanya daging, melainkan juga sapi yang dijual dalam bentuk sapi hidup, olahan daging dan olahan limbah, dan produk-produk lainnya yang dikembangkan masing-masing PKP.

Hubungan antara Koperasi Sekunder di atas dituangkan dalam AD/ART atau peraturan turunannya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi persaingan antar sesama PKP, yang dapat melemahkan kinerja korporasi secara keseluruhan. Dengan model ini, semua individu anggota memperoleh:

1. Keuntungan *intangibile*, yaitu berupa SHU dari korporasi melalui koperasi sekunder
2. Keuntungan *tangible*, yaitu berupa kemudahan memperoleh kebutuhan dan akses pasar
3. Keuntungan lain yang dikembangkan oleh masing-masing PKP, yang tertentu saja berbeda sesuai dengan kreativitas masing-masing PKP.

Sesuai dengan amanat Permentan No 18 tahun 2018 yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan korporasi sapi ini pada dasarnya adalah bagian dari program "Pembangunan Kawasan Korporasi Pertanian". Dalam konteks itu, pengembangan usaha sapi berbasis korporasi di Kediri dapat dituangkan dalam *roadmap* berikut (Gambar 3).



Gambar 3. Roadmap korporasi sapi potong Kediri

Pentahapan di atas direkomendasikan, bukan hanya mempertimbangkan aspek fisik atau sumberdaya, melainkan juga aspek sosial petani:

1. Pembentukan korporasi petani berbeda dengan korporasi swasta yang relatif serba siap atau dapat disiapkan. Walau pun semua korporasi swasta juga menempuh cara pentahapan, tetapi dihela oleh dan/atau berorientasi output/profit, sedangkan korporasi petani dihela oleh hasil musyawarah dan mufakat
2. Yang akan dibangun adalah beberapa Poktan dengan latar belakang keragaman yang sudah disebutkan sebelumnya. Keadaan ini memerlukan proses dan waktu untuk penyatuan visi dan persepsi tentang banyak hal yang lebih detail.

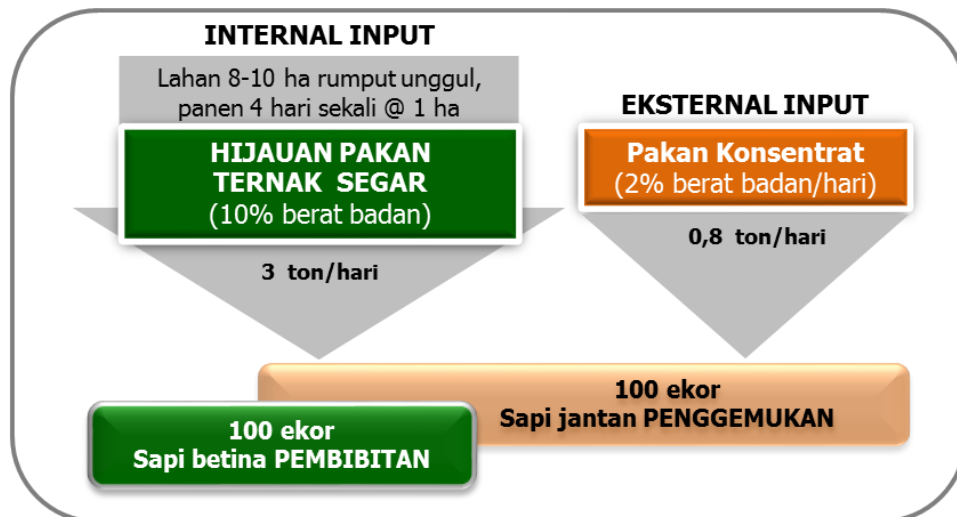
Manajemen Pakan

Secara umum, rekomendasi ransum sapi potong hendaknya mempertimbangkan status fisiologi dan tujuan pemeliharaan. Lebih detilnya sebagai berikut:

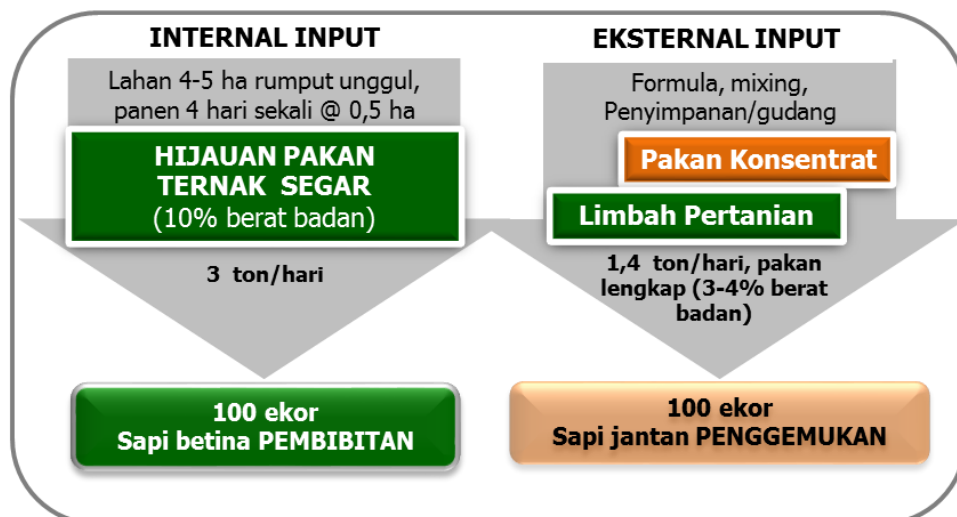
1. Pakan breeding untuk sapi betina tidak bunting sampai bunting 7 bulan, direkomendasikan pakan hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan

2. Pakan breeding untuk sapi betina bunting tua (7 bulan ke atas) sampai menyusui, selain pakan hijauan, diperlukan tambahan *surge feeding postpartum* berbasis bahan pakan lokal
3. Pakan sapi penggemukan ditempuh dengan dua pilihan, yaitu: (a) hijauan dan konsentrat, dan, (b) pakan lengkap (berbasis limbah pertanian dan limbah *agroindustry*).

Berdasarkan kebutuhan teoritis pakan di atas, dapat disusun dua alternatif strategi manajemen pakan sebagai berikut (Gambar 4).



Alternatif 1. Pakan berbasis rumput unggul dan konsentrat



Alternatif 2. Pakan penggemukan berbasis pakan lengkap

Gambar 4. Alternatif strategi manajemen pakan 200 ekor sapi potong

Perhitungan kebutuhan pakan hijauan 3 ton/hari untuk 200 ekor sapi di atas, adalah "pukul rata", mengabaikan peningkatan kebutuhan akibat peningkatan berat badan, dengan pertimbangan, akan selalu ada pergiliran umur dan berat sapi akibat *replecement*

untuk mempertahankan populasi. Dengan demikian, kebutuhan total untuk 200 ekor sapi tidak akan berubah signifikan

Berdasarkan kepemilikan lahan anggota kelima Poktan seluas 9-12 ha (Tabel1), ketersediaan pakan hijauan ternak cukup aman. Sementara itu, dalam strategi di atas (Gambar 4), hanya dibutuhkan lahan maksimal 10 ha untuk mencukupi kebutuhan 200 ekor sapi. Potensi ini belum termasuk limbah pertanian anggota dan di luar anggota yang cukup melimpah. Dengan pengaturan jadwal tanam sesuai kebutuhan panen empat hari sekali di atas, maka ketersediaan pakan hijauan tidak ada kendala.

Untuk memudahkan penyusunan formula pakan yang lebih spesifik, BPTP Jatim mengembangkan aplikasi "TOPAS"²

Pengembangan SDM

Urgensi dan tingkat kepelikan pengembangan SDM, dalam konteks pembangunan korporasi sapi potong, disebabkan beberapa hal:

1. Program ini identik dengan upaya mengubah perilaku (*skill, knowledge, dan attitude*) manusia pelakunya, guna mendukung perubahan usaha "tradisional" menuju modern
2. Kemauan dan kemampuan SDM (orang dewasa) untuk mengembangkan dirinya, lebih bergantung kepada kesiapan dan relevansinya dengan kepentingannya, bukan kepada tingginya janji dari sebuah gagasan di masa depan. Dalam hal ini, pelibatan mereka dalam setiap jenjang proses perubahan menjadi sangat penting
3. Upaya pengembangan SDM bertujuan untuk menjamin bergulirnya proses interaksi dan iterasi, baik secara internal maupun eksternal. Butir ini biasanya disebut "keberlanjutan"
4. Walaupun kemandirian SDM (orang dewasa) lebih tinggi daripada anak-anak, namun tetap diperlukan pendampingan berkelanjutan dari instansi terkait (sebagai mitra dialog).

Dengan demikian, yang dimaksud "pengembangan SDM" bukan hanya anggota Poktan (atau korporasi, nanti), melainkan juga kesiapan para SDM pendamping.

Peliknya pengembangan SDM, baik yang akan dilakukan oleh instansi terkait, maupun oleh korporasi itu sendiri pada saatnya nanti, adalah tidak mungkinnya "main copot" hanya karena ada yang berkinerja buruk. Kesetiakawanan yang tumbuh dari "ewuh pakewuh" masih cukup menjadi bagian sikap anggota Poktan umumnya. Hal ini akan berbeda apabila korporasi sudah efektif menjadi *holding* sapi potong kelak (Gambar 3).

Agar konsisten dengan bagian sebelumnya (Kelembagaan, halaman 11), maka rekomendasi pengembangan SDM ini akan disesuaikan dengan tahapan yang dicantumkan

²Saat ini sedang dalam penyempurnaan, dan akan segera diunggah dalam Playstore

dalam Gambar 3 (Tabel 4). Rekomendasi dibatasi sampai dengan tahap ketiga (inisiasi *holding* sapi potong), sesuai dengan batasan efektif yang telah dijelaskan dalam Gambar 3.

Beberapa catatan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

1. Hanya mencantumkan rekomendasi pengembangan SDM secara global namun prinsip, agar lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika kemajuan korporasi
 2. Kehadiran pendamping selalu dicantumkan, karena dalam interaksinya dengan Poktan, dengan sendirinya sudah merupakan bagian dari pengembangan SDM
 3. Tidak mencantumkan penguasaan teknologi budidaya, karena sudah dilakukan Bimtek sebanyak dua kali. Kedua, perihal teknis, dapat secara langsung dilakukan bersama pendamping, kecuali ada kepentingan yang sangat urgen atau hadirnya teknologi baru.
- Sedangkan pengembangan SDM yang lebih detil dan akademis, disajikan dalam Lampiran 3.

Tabel 4. Rekomendasi pengembangan SDM sesuai dengan tahapan kemajuan korporasi yang direncanakan

No	Tahap (dari Gambar 3)	Pendekatan pengembangan SDM		
		Faktor <i>skill</i>	Faktor <i>knowledge</i>	Faktor <i>attitude</i>
1	Konsolidasi	Kehadiran pendamping sebagai motivator, fasilitator, dan mediator		
		Pendampingan penerapan SOP (Form/IK) ¹⁾	Bimtek penyusunan SOP	Pembelajaran penerapan SOP Bimtek prinsip berorganisasi
2	Pengembangan usaha & jejaring	Kehadiran pendamping sebagai motivator, fasilitator, mediator, dan advokasi untuk pengembangan jejaring/kolaborasi dengan pengusaha eksternal		
		Bimtek akuntansi dasar	Bimtek manajemen modern (POAC)	Bimtek moral bisnis dan sosio-kultur
3	Inisiasi <i>holding</i> sapi potong	Kehadiran pemerintah sebagai fasilitator, stimulator dan regulator		

¹⁾ Form/IK: teknik pengisian formulir-formulir/catatan lainnya, dan IK (instruksi kerja)

PENUTUP

Kegiatan pendampingan yang telah dicapai, memang cukup memuaskan. Namun demikian, masih diperlukan waktu yang cukup untuk mencapai visi seperti diamanatkan oleh Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/2018. Disarikan dari Permentan tersebut, paling tidak, ada beberapa kata kunci yang menjadi ciri korporasi dimaksud:

1. "**Kawasan pertanian**", berarti mencakup beberapa sentra produksi yang berskala ekonomi. Dalam tahap sekarang, program korporasi sapi potong di Kediri ini baru membangun sentra-sentra produksi ternak yang dipresentasikan oleh Poktan
2. **Terintegrasi**. Saat ini baru diupayakan integrasi atau pembenahan manajemen internal Poktan dalam konteks korporasi. Sementara itu, pembangunan menjadi "kawasan", yaitu terintegrasinya kelima Poktan, masih dalam tahap pembentukan Dewan Pendiri Koperasi. Dalam Permentan di atas, yang dimaksud "integrasi" juga mencakup integrasi antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Kelak, seharusnya juga integrasi internasional
3. **Berkelanjutan**. Ini dapat dimaknai sebagai adanya kemajuan secara bertahap dan terencana sesuai dengan prinsip manajemen modern, yaitu "fokus kepada tujuan, dengan pendekatan (pembenahan) proses"
4. **Berbasis korporasi**. Butir ini dapat dimaknai sebagai "mengubah pola usaha tradisional peternak/Poktan, menuju pola usaha modern". Artinya, paling tidak:
 - Mengubah budaya mengingat menjadi budaya disiplin mencatat
 - Mengubah budaya acak menjadi budaya sistematis dan terencana
 - Mengubah budaya yang terlalu lentur menjadi budaya komitmen-ketat dengan segala konsekuensinya
 - Mengubah budaya "ewuh pakewuh" menjadi budaya keterbukaan dan akuntabel.Dari sisi pendamping, mengubah budaya motivator, fasilitator dan mediator, menjadi budaya fasilitator, stimulator dan akhirnya regulator pada saatnya kelak.

Dalam waktu yang relatif singkat (September-Desember 2021), paling tidak BPTP Jatim bekerjasama dengan *stake holder* lainnya, telah berhasil membangun fondasi yang baik. Kerjasama yang baik ini perlu terus ditingkatkan dan diintensifkan, mengingat masih banyaknya hal yang harus dilakukan bersama peternak, Poktan dan korporasi yang akan dibangun, di tengah berbagai kesulitan riil dan yang dibayangkan, menuju tercapainya cita-cita luhur menyejahterakan masyarakat, khususnya para petani dan peternak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kemajuan yang cukup memuaskan yang telah dicapai sejauh ini, paling tidak untuk lingkup penugasan kepada BPTP Jatim, tidak lepas dari peran dan kerjasama yang baik berbagai pihak. Oleh karena itu BPTP Jatim menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada:

1. Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai mitra satu atap BPTP Jatim, yang telah menyalurkan bantuan infrastruktur, sapi dan aset lainnya
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang telah dengan setia mendampingi petugas BPTP Jatim di lapang dan memfasilitasi kepentingan administrasinya
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, melalui Kepala BPP Ngadiluwih, yang telah menugasi PPL-nya untuk mendampingi secara teknis di lapangan
4. Para Ketua dan anggota Poktan Ngadimulyo, Ngudi Rejeki, Banjarsari, Tani Makmur, dan Subur Kabupaten Kediri, yang telah bersedia menjadi mitra dialog terbuka dan akrab dalam menyelesaikan program ini bersama-sama
5. Camat Ngadiluwih, dan para Kepala Desa Ngadiluwih, Banjarejo, Badal dan Tales, yang atas kepemimpinannya, telah menciptakan suasana yang kondusif
6. Berbagai pihak yang telah berpartisipasi menjadi narasumber dalam FGD, antara lain BRI Cabang Kediri, Bank Jatim Perwakilan Kediri, RPH Kediri, Kadin Kabupaten dan Kota Kediri, para pengusaha sarana produksi ternak, pemasaran dan olahan daging sapi. Walau korporasi yang akan dibentuk belum terjalin jaringan dengan lembaga-lembaga terkait tersebut, namun ke depan akan menjadi mitra strategis. Saat ini kelima Poktan masih melakukan konsolidasi ke dalam, dan masih dalam proses membentuk model korporasi yang disepakati.

Sukses ini adalah sukses bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa Meridhoi setiap upaya kita.

Aamiin.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kendala dan dampak pada masing-masing kelompok pelaku rantai pasok berdasarkan hasil FGD

No	Pelaku rantai pasok	Kendala	Dampak
1	Penyedia Input	Tidak ada pembagian tugas yang jelas/tidak ada kontrak tertulis bagi penyedia input	Ketidak jelasan posisi penyedia input dalam menghadapi bantuan 1000 sapi bagi peternak di Kecamatan Ngadiluwih
		Pembayaran tersendat	Arus kas Penyedia input terhambat(berpotensi kerugian)
2	Peternak/Kelompok Ternak	Modal kecil	Ketersediaan pakan bagi ternak tidak terjamin dan berpotensi menurunkan profit
		Pengolahan limbah belum optimal	Pencemaran lingkungan sehingga menurunkan taraf kesehatan lingkungan
		Pembagian tugas dalam kelompok belum proporsional	Pengelolaan usaha ternak tidak optimal
		Sosialisasi antar anggota peternak masih kurang	Anggota tidak kompak
		<ul style="list-style-type: none"> • Stock pakan tidak stabil • Harga pakan yang bernutrisi mahal • Ketersediaan HMT di tiap kelompok masih dipertanyakan • Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan ternak 	Target pertambahan bobot badan tidak tercapai, kesehatan ternak rendah, terjadi kematian ternak, sehingga profit peternak akan menurun
		Harga jual ternak murah	Profit peternak akan menurun
		Kurangnya pendampingan dari dinas terkait Aturan dalam korporasi masih belum jelas	Minimnya pengakuan legalitas usaha dan bantuan bagi usaha ternak sapi potong`
		Sapi import biasanya sulit bunting	Tidak ada perbanyakan ternak
3	Marketing	Perijinan produk olahan sulit (BPOM, NIB dan PIRT)	Jangkauan pemasaran hasil olahan tidak bisa diperluas
		Harga daging naik sementara harga olahan daging tidak bisa naik, berkaitan dengan daya beli konsumen dan persaingan pasar	Keuntungan menurun
		Pengguna jasa pemotongan di RPH masih sangat minim	Kualitas daging tidak terjamin
		Harga sapi mahal karena banyak pembeli dari luar kota sehingga pembelian dilakukan dengan sistem berhutang	Profit rendah

No	Pelaku rantai pasok	Kendala	Dampak
		Daya beli konsumen rendah	Profit rendah
		Harga daging fluktuatif	Profit rendah
		Modal terbatas	Produktivitas menurun
4	Enabler	Kebijakan impor sapi	Harga sapi di dalam negeri menjadi terpengaruh
		Koordinasi antar instansi terkait masih kurang	Alur informasi antar stakeholder terhambat
		Tenaga lapangan kurang insentif	Pekerjaan tidak optimal
		Tenaga kesehatan ternak masih terbatas	Kesehatan ternak tidak terjamin

Sumber: Hasil FGD tanggal 5-6 Oktober 2021 di Hotel Insumo Palace, Kediri, Jawa Timur

Dari hasil uraian Lampiran 1 di atas, maka mekanisme penanggulangan kendala yang disepakati oleh peserta FGD adalah sebagai berikut:

1. Pembangun SDM dari berbagai aspek termasuk kompetensi, perilaku, moral dan mental (Enabler: Institusi dan Organisasi, keuangan/finance)
2. Membangun kepercayaan inter kelompok dan antar kelompok (Enabler: gender, keuangan/finance, Institusi dan Organisasi, lingkungan bisnis, tenaga kerja dan informasi serta konseling)
3. Regulasi tentang harga sapi dan daging sapi (Enabler: Pasar/market, lingkungan bisnis, Institusi dan Organisasi)
4. Pembangunan rumah kompos dan pengolahan limbah (Institusi dan Organisasi, tenaga kerja)
5. Persiapan pakan HMT (Enabler: Informasi dan konseling)
6. Optimalisasi manajemen pemeliharaan (tenaga kerja)
7. Penjaminan kondisi dan kualitas bibit (Enabler: keuangan/finance dan marketing)
8. Tim pengawasan pengadaan input (Enabler: lingkungan bisnis)
9. Pengadaan sapi bakalan oleh Supplier lokal (Enabler: marketing, lingkungan bisnis, permodalan)
10. Sinergi petani dan peternak untuk pemanfaatan limbah (Enabler: tenaga kerja)
11. Pendampingan dari dinas terkait ((Enabler: Informasi dan konseling).

Kegiatan pendampingan yang sudah dilaksanakan mengacu pada hasil FGD, adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Satker Dirjen PKH dalam hal ini Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan Program dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kediri (DKPP) Kab.Kediri tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Melaksanakan Demplot budidaya Rumput Pakchong dan tanaman Sorgum di masing-masing kelompok penerima manfaat seluas 1 Ha.
3. Melakukan Bimtek tahap kedua tentang penguatan kelembagaan kelompok berbasis korporasi
4. Melakukan Dem unit pembuatan Silase dengan kapasitas 3 Ton di unit pengolahan pakan kelompok " Subur " penerima manfaat.
5. Melakukan penyiapan pengolahan limbah ternak.
6. Melakukan pendampingan dan pengawalan teknis manajemen pemeliharaan ternak.

Lampiran 2. Hasil kesepakatan pembetukan korporasi Desa sapi di Kab.Kediri

NOTULEN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN KORPORASI SAPI POTONG DI KEDIRI Kediri, 30 Nopember 2021

Pengarah : drh. Istar Abadi, M.Agr
Moderator : Saiful Hosni, SP
Notulis : Galuh Agung S, S.Tr.P

Bahwa untuk menumbuhkan kelembagaan korporasi sapi potong di Kediri, dipandang perlu untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam dan antar kelompok penerima manfaat "Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi" dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian. Penerima manfaat program tersebut adalah:

1. Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri
2. Kelompok Tani Ngadi Mulyo, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri
3. Kelompok Tani Tani Makmur, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri
4. Kelompok Tani Banjarsari, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri
5. Kelompok Tani Subur, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri.

Untuk mewujudkan korporasi tersebut telah dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh pengurus dan/atau sebagian anggota kelima kelompok (**Lampiran 1**).

Hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana tindak lanjut
1.	Aset yang secara resmi akan diserahkan kemudian dari Dirjen PKH kepada lima Poktan adalah aset kelompok, bukan aset individu	
2.	a. Dalam waktu dekat kelima Poktan masing-masing akan menerima 200 ekor sapi potong, yang dikelola secara bersama/berkelompok. Hal ini memerlukan tindakan nyata dan perubahan budaya beternak, dari usaha individu menjadi usaha kelompok b. Beberapa hal penting yang dalam waktu dekat harus ditangani dengan pengelolaan yang baik adalah kecukupan pakan hijauan, pemeliharaan harian ternak dan penanganan limbah, beserta konsekuensi pembiayaan dan/atau hasilnya	Semua kelompok diharapkan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam kelompoknya masing-masing, sebelum serahkannya 200 ekor sapi per kelompok
PRA KORPORASI		
3.	Wujud korporasi yang disepakati adalah koperasi	
4.	Nama koperasi	Ditunda sampai 1 bulan setelah serah terima
5.	Persyaratan dokumen pendirian koperasi dan Anggaran Dasar	
	a. Daftar nama Dewan Pendiri Dewan Pendiri Koperasi adalah semua pengurus dan/atau anggota Poktan yang hadir dalam acara hari ini.	Lampiran 2 Ketua terpilih memilih Wakil Ketua, Sekretaris 1&2, Bendahara

Lampiran 2. Hasil kesepakatan pembentukan korporasi Desa sapi di Kab.Kediri
(Lanjutan)

No	Uraian	Rencana tindak lanjut
	Ketua : H. Ahmad Dardiri Wakil Ketua : Sekretaris 1 : Sekretaris 2 : Bendahara :	
	b. Nama dan tempat kedudukan	
	c. Maksud, tujuan dan bidang usaha	
	d. Ketentuan mengenai keanggotaan Yang dapat menjadi anggota koperasi hanya anggota kelompok	
	e. Ketentuan mengenai rapat anggota	
	f. Ketentuan mengenai pengelolaan	
	g. Ketentuan mengenai permodalan	
	h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya	
	i. Ketentuan mengenai pembagian SHU	
	j. Ketentuan mengenai sangsi	
6.	Semua persyaratan tersebut akan disiapkan oleh Dewan Pendiri Koperasi (Dewan Pendiri)	Akan dimusyawarahkan kemudian

Kediri, 30 Nopember 2021

Mengetahui,
Pengarah,



drh. Istar Abadi, M.Agr

Moderator,



Saiful Hosni, SP

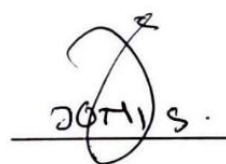
Notulis,



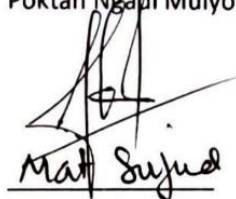
Galuh Agung S, S.Tr.P

Menyetujui,

Ketua
Poktan Ngudi Rejeki,



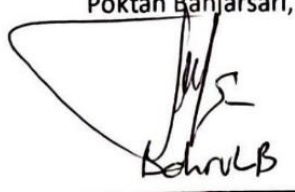
Ketua
Poktan Ngadi Mulyo,



Ketua
Poktan Tani Makmur,



Ketua
Poktan Banjarsari,



Ketua
Poktan Subur,

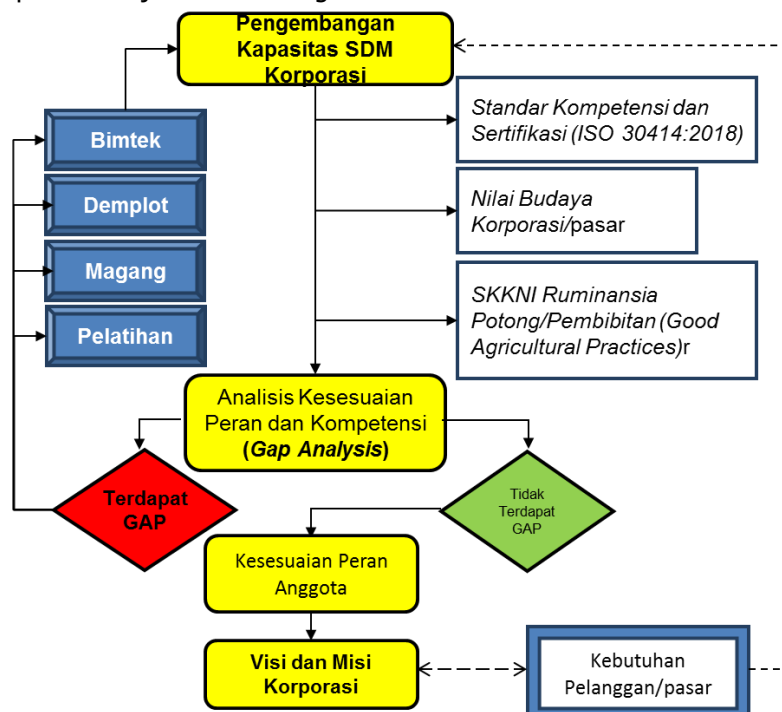


Lampiran 3. Pengembangan SDM mendukung pengembangan sapi potong berbasis korporasi

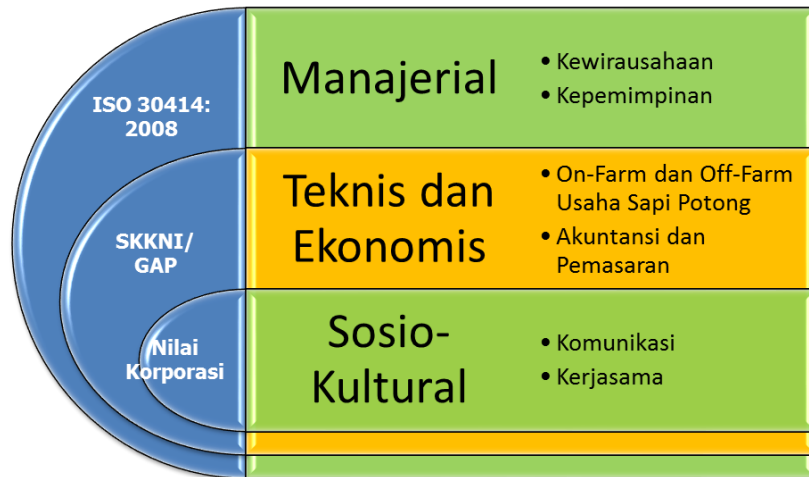
Dalam mendukung kinerja lembaga korporasi yang dibentuk setiap anggota perlu memahami tugas, fungsi dan perannya sebagai individu yang aktif dalam kegiatan organisasinya. Oleh karena itu,

manajemen alokasi peran dan tugas masing-masing anggota perlu dipetakan dengan jelas dan dipahami. Hal ini dapat dilakukan jika bentuk transformasi kelembagaan dan tujuan-tujuan organisasi telah ditetapkan. Pelaksanaan peran dan tugas ini harus didasarkan pada kecakapan/kompetensi individu yang diharapkan dalam mencapai target yang ditetapkan. Mengacu pada bagan Roadmap Korporasi Sapi Potong di atas (Gambar 3), upaya pengembangan SDM perlu didukung dengan penerapan standar (ISO) 30414:2018 serta SKKNI (*Good Agricultural Practices*) guna menjamin mutu baik produk maupun layanan lain yang dihasilkan korporasi. Cakupan standar ini meliputi: (1) kepatuhan dan etika; (2) biaya; (3) perbedaan/diversity; (4) kepemimpinan; (5) budaya organisasi; (6) kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan organisasi; (7) produktifitas; (8) rekrutmen, mobilitas dan rotasi; (9) keterampilan dan kemampuan; dan (10) ketersediaan tenaga kerja. Dibutuhkan analisis kesesuaian peran dan kompetensi untuk memetakan kapasitas SDM korporasi. Jika terdapat kesenjangan antara kesesuaian peran dan kapasitas individu maka dapat dilakukan 2 strategi yakni: (1) On-job Training dan (2) Off-job Training. Bentuk kegiatan yang dapat menjadi alternatif peningkatan kapasitas tersebut dapat berupa bimbingan teknis, demplot, magang maupun pelatihan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis-konseptual dan pengetahuan lainnya yang mendukung perannya dalam organisasi.

Keragaan anggota kelompok penerima manfaat program, mayoritas berada dalam usia produktif dengan pengalaman usaha ternak yang berbeda-beda. Beberapa anggota kelompok merupakan alumni SPR yang telah pernah memperoleh pendampingan teknis sedangkan sebagian yang lain merupakan peternak biasa (Non SPR). Terdapat peluang kesenjangan kemampuan dari setiap anggota kelompok yang beranggotakan alumni SPR dengan kelompok non SPR. Interaksi pembelajaran/pertukaran informasi antara kelompok penerima manfaat belum ada sehingga proses difusi inovasi tidak terjadi sebagai implikasi dari pengelolaan aset bantuan oleh kelompok sebagai unit usaha mandiri. Sehingga perlu dibentuk suatu forum pertemuan atau konsolidasi yang dapat memfasilitasi antara kelompok penerima bantuan. Dukungan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM juga dapat diberikan oleh beberapa lembaga seperti Balai Diklat dan BPTP Jawa Timur dengan dukungan dari penyuluh pertanian lapang. Penguatan nilai budaya korporasi juga perlu menjadi fokus utama sehingga ruh organisasi dan soliditas tetap terjaga. Strategi pengembangan kapasitas SDM korporasi disajikan dalam bagan alur berikut.



Gambar 5. Alur Pengembangan Kapasitas SDM Korporasi



Gambar 6. Kerangka Kompetensi Dasar Yang Diperlukan Dalam Pengembangan SDM Korporasi

Tabel 5. Alternatif Topik/Materi Pendampingan Yang Dibutuhkan

No.	Topik/Materi Yang Direkomendasikan
1.	Literasi Keuangan Digital dan Akses Permodalan
2.	Penyusunan Rencana Bisnis dan Publik Speaking (Komunikasi Pemasaran)
3.	Pemanfaatan Media Sosial Dalam Promosi dan Pemasaran
4.	Pemanfaatan Aplikasi Formulasi Pakan Ruminansia Berbasis Android Smartphone
5.	Teknologi Pakan (Pembuatan Fermentasi Jerami Padi dan Pakan Lengkap)
6.	Teknologi Pengawetan Pakan Hijauan (Silase)
7.	Manajemen Produksi Hijauan Pakan Ternak
8.	Pemberian Pakan Tambahan /Flushing Pakan

Catatan: Penentuan topik perlu didasarkan pada dinamika perkembangan kelembagaan dan usaha ternak di masing-masing kelompok penerima manfaat